



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**

KEGIATAN
MS I Tahun Sidang 2022-2023
(16 Agustus – 30 Agustus 2022)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.


24/22

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	2
C. FUNGSI PENGAWASAN	2
KOMISI II	3
A. FUNGSI LEGISLASI	3
B. FUNGSI ANGGARAN	4
C. FUNGSI PENGAWASAN	4
KOMISI III	5
A. FUNGSI LEGISLASI	5
B. FUNGSI ANGGARAN	5
C. FUNGSI PENGAWASAN	6
D. TUGAS KHUSUS	8
KOMISI IV	10
A. FUNGSI LEGISLASI	10
B. FUNGSI ANGGARAN	10
C. FUNGSI PENGAWASAN	10

KOMISI V	13
A. FUNGSI LEGISLASI	13
B. FUNGSI ANGGARAN	13
C. FUNGSI PENGAWASAN	15
KOMISI VII	17
A. FUNGSI LEGISLASI	17
B. FUNGSI ANGGARAN	17
C. FUNGSI PENGAWASAN	18
KOMISI VIII	20
A. FUNGSI LEGISLASI	20
B. FUNGSI ANGGARAN	20
C. FUNGSI PENGAWASAN	20
KOMISI IX	23
A. FUNGSI LEGISLASI	23
B. FUNGSI ANGGARAN	23
C. FUNGSI PENGAWASAN	34

KOMISI X	36
A. FUNGSI LEGISLASI	36
B. FUNGSI ANGGARAN	36
C. FUNGSI PENGAWASAN	38
KOMISI XI	47
A. FUNGSI LEGISLASI	47
B. FUNGSI ANGGARAN	47
C. FUNGSI PENGAWASAN	51
BADAN LEGISLASI	61
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	63
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	84
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	85
BADAN ANGGARAN	86
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	90

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	--	Panja Pembahasan RUU PDP telah Selesai membahas seluruh DIM Masih dalam pembahasan Timus dan Timcil.	Raker Panja dan Timus/Timsin.
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Komisi I DPR RI	--	Melanjutkan penyusunan RUU Penyiaran.	Kunjungan ke daerah untuk mencari masukan terkait RUU Penyiaran.
3.	Ruu tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (<i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government Of The Republic of Fiji Concerning Cooperation in The Field of Defence</i>)	---	---	---

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Mitra Kerja Komisi I DPR RI	Rapat Kerja	Telah melaksanakan Raker terkait Realisasi APBN TA. 2021.	Untuk disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK SUBSTANSI	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menkominfo	Pemblokiran situs dan pendaftaran PSE.	Kunjungan lapangan ke kantor Menkominfo.	--
2.	Menkominfo	TVRI, BAKTI.	Penyiapan konten di era penyiaran digital dan dukungan TIK dalam pelayanan publik di daerah.	Kunspek Komisi I DPR RI.
3.	KADIN	Dewan Pengurus Bidang Komunikasi dan Informatika.	Permohonan Audiensi.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pembentukan Provinsi di Papua Barat Daya	a. Penyusunan b. Pembahasan c. <i>Harmonisasi</i> ; d. <i>Prolegnas</i> ; e. <i>Pemantauan & peninjauan</i>	Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya ke Kota Sorong Provinsi Papua Barat.	Untuk mendapatkan masukan terkait RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
2.	RUU tentang Pembentukan Provinsi di Papua Barat Daya	a. Penyusunan b. Pembahasan c. <i>Harmonisasi</i> ; d. <i>Prolegnas</i> ; e. <i>Pemantauan & peninjauan</i>	Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI atas RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja.	<p>1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan pendapat/pandangan dari Pemerintah terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.</p> <p>2. Pemerintah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Komisi II DPR RI dan akan dibahas dalam Panja.</p> <p>3. Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan Panja Pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Barat Daya.</p>

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	RUU tentang Pembentukan Provinsi di Papua Barat Daya	a. Penyusunan b. Pembahasan c. <i>Harmonisasi</i> ; d. <i>Prolegnas</i> ; e. <i>Pemantauan & peninjauan</i>	Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda membahas DIM RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.	1. Aspirasi dari masyarakat mengenai RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan dibahas lebih lanjut pada rapat selanjutnya. 2. Komisi II DPR RI bersama DPD RI dan Pemerintah menyepakati pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dilanjutkan oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

-

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disebut dengan RUU tentang HAPER)	---	Pada tanggal 18 sd 26 Agustus 2022, Komisi III DPR RI belum melakukan kegiatan pembahasan RUU tentang Haper.	---
2.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan RUU tentang Narkotika)	---	Pada tanggal 18 sd 26 Agustus 2022, Komisi III DPR RI belum melakukan kegiatan pembahasan RUU tentang Narkotika.	---
3.	Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)	RDPU	Pada tanggal 23 Agustus 2022, Komisi III DPR RI melaksanakan RDPU dengan : 1. Dewan Pers 2. Persatuan Doktor Hukum Indonesia (PDHI) 3. Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).	RUU <i>Carry Over</i>

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kepala BNN RI 2. Kepala BNPT 3. Kepala LPSK 4. Ketua Komnas HAM RI 5. Sekjen KY RI	Raker dan RDP.	Pembahasan : 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021.	1. RDP dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 25 Agustus 2022, pkl. 10.00 WIB.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2. Hapsem BPK Semester I dan II TA 2021.	2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pageran Kherul Saleh, M.M.
2.	1. Menkumham RI 2. Jaksa Agung RI, diwakilkan oleh Wakil Jaksa Agung dan JAM Bidang Pembinaan. 3. Ketua KPK, diwakilkan oleh Wakil Ketua KPK. 4. Kepala PPATK	Raker	s.d.a.	1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 25 Agustus 2022, pk1. 14.00 WIB. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M..
3.	1. Kapolri diwakilkan oleh Asrena 2. Sekretaris MA RI 3. Sekjen MK RI 4. Sesjen MPR RI 5. Sekjen DPD RI	Raker dan RDP	s.d.a.	1. RDP dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 29 Agustus 2022. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H. M.Hum..

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Ketua LPSK 2. Ketua Komnas HAM RI 3. Ketua Kopolnas.	RDP dan RDPU	Komisi III melaksanakan RDP dan RDPU dengan LPSK, Komnas HAM RI, dan Kopolnas pada tanggal 22 Agustus 2022, membahas mengenai	1. RDP dan RDPU dilaksanakan secara fisik dan virtual. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			permasalahan kasus aktual di Kepolisian RI (Kasus Brigadir J).	DPR RI, Bp. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom..
2.	Jaksa Agung RI	Raker	Komisi III melaksanakan Raker dengan Kejaksaan RI pada tanggal 23 Agustus 2022, membahas mengenai kasus korupsi yang terjadi di PT Waskita Beton Precast (anak usaha PT Waskita Karya Tbk), dan PT Duta Palma.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum..
3.	Kapolri	Raker	Komisi III melaksanakan Raker dengan Kepolisian Negara RI pada tanggal 24 Agustus 2022, membahas mengenai permasalahan kasus aktual di Kepolisian RI (Kasus Brigadir J).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual. 2. Dipimpin oleh Ketua Komisi III, Bp. Ir. Bambang Wuryanto, MBA..
4.	Tim Advokat Penegak Hukum dan Keadilan (TAMPAK)	RDPU	Membahas: Pelanggaran kode etik Polri serta dugaan suap dan tindak pidana lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. RDPU tanggal 30 Agustus 2022 dilaksanakan secara fisik dan virtual. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp H. Desmond Juanedi Mahesa, S.H., M.H..

D. TUGAS KHUSUS

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<p>1. Menteri Hukum dan HAM RI</p> <p>2. Menteri Pemuda dan Olah Raga RI</p>	Raker	<p>1. Berdasarkan Surat Presiden:</p> <p>a. Nomor R-26/Pres/06/2022 tanggal 17 Juni 2022 hal: Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. <i>Jordi Amat Maas</i>; dan</p> <p>b. Nomor R-27/Pres/06/2021 tanggal 17 Juni 2022 hal: Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. <i>Sandy Henry Walsh</i>.</p> <p>2. Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 29 Juni 2022 menyetujui dan memutuskan "Pembahasan tentang pertimbangan Permohonan Kewarganegaraan RI atas nama <i>Sdr. Jordi Amat Maas (Warga Negara Spanyol)</i> dan <i>Sdr. Sandy Henry Walsh (Warga Negara Belanda)</i> diserahkan kepada Komisi III DPR RI dan Komisi X DPR RI".</p> <p>3. Pada tanggal 29 Agustus 2022 Komisi III DPR RI melaksanakan Raker dengan Menkumham RI dan Menpora RI membahas pertimbangan pemberian Kewarganegaraan RI atas nama :</p> <p>a. <i>Jordi Amat Maas</i>, pesepak bola, kewarganegaraan Spanyol;</p>	<p>Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan RI (Naturalisasi) Atlet Pesepakbola.</p>

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>b. <i>Sandy Henry Walsh</i>, pesepak bola, kewarganegaraan Belanda. <u>Keputusan Raker :</u> “Komisi III DPR RI menyetujui Pemberian Kewarganegaraan RI atas nama <i>Jordi Amat Maas</i> dan <i>Sandy Henry Walsh</i> untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Kementerian Pertanian (Menteri dan 11 Eselon I) b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri dan 13 Eselon I) c. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Menteri dan 11 Eselon I) d. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Rapat Kerja membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA. 2021.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3 Eselon 1)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	RDP Panja Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan, membahas: a. Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan pasca diundangkannya Undang-Undang	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>b. Penegakan Hukum atas Tindak Kejahatan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan oleh Dirjen Penegakan Hukum LHK; serta</p> <p>c. Pengawasan atas kewajiban Pemegang Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan serta Pelepasan Kawasan Hutan.</p>	
2.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2 Eselon 1)	<p>a. Pelaksanaan undang-undang;</p> <p>b. Pelaksanaan keuangan negara;</p> <p>c. Kebijakan Pemerintah.</p>	RDP, membahas Pengelolaan Wisata Alam Taman Nasional Komodo, di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
3.	Para Pemangku Kepentingan Terkait.	<p>a. Pelaksanaan undang-undang;</p> <p>b. Pelaksanaan keuangan negara;</p> <p>c. Kebijakan Pemerintah.</p>	Audiensi untuk menerima masukan mengenai Kebijakan Program Pupuk Bersubsidi dan masukan terkait Kebijakan Upaya Pengembangan Industri Hasil Tembakau.	
4.	Kunjungan Kerja Spesifik Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023	<p>a. Pelaksanaan undang-undang;</p> <p>b. Pelaksanaan keuangan negara;</p> <p>c. Kebijakan Pemerintah.</p>	Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor dan <i>Workshop Wase4Change</i> di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau dan berdiskusi mengenai Pengelolaan Sampah oleh <i>Waste4Change</i> .	
5.	Kunjungan Kerja Spesifik Masa Sidang	<p>a. Pelaksanaan undang-undang;</p>	Kunjungan Kerja Spesifik ke Pusat Persemaian Rumpin di Kabupaten Bogor,	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	I Tahun Sidang 2022-2023	b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau dan berdiskusi mengenai Pengelolaan Pusat Persemaian Rumpin.	
6.	Kunjungan Kerja Spesifik Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, untuk meninjau dan berdiskusi mengenai Kesehatan Ikan dan Lingkungan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI, BMKG DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN /BASARNAS	RAPAT KERJA / RAPAT DENGAR PENDAPAT (Terbuka).	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA.2021; - Realisasi APBN TA. 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022; - Membahas RKA K/L TA. 2023 Kementerian Desa PD TT, BMKG dan BNPP (BASARNAS) dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2023. - Membahas usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi. 	<ul style="list-style-type: none"> - RAKER/RDP dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 10.00 - 13.00 WIB secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Desa, PD TT; 2. Kepala BMKG; dan 3. Kepala BNPP/BASARNAS; beserta jajaran.
2.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	RAPAT KERJA (Terbuka).	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA.2021; - Realisasi APBN TA. 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022; - Membahas RKA K/L TA. 2023 Kementerian Desa PD TT, BMKG dan BNPP (BASARNAS) dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> - RAKER dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 14.00 - Selesai secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh Menteri Perhubungan; beserta jajaran.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Membahas usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi. 	
3.	KEMENTERIAN PUPR	RAPAT KERJA (Terbuka).	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA.2021; - Realisasi APBN TA. 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022; - Membahas RKA K/L TA. 2023 Kementerian Desa PDTT, BMKG dan BNPP (BASARNAS) dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2023. - Membahas usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi. 	<ul style="list-style-type: none"> - RAKER dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 10.00 - Selesai secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh Menteri PUPR; beserta jajaran.
4.	KEMENTERIAN PUPR	RAPAT DENGAR PENDAPAT (Terbuka).	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Agustus 2022; - Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> - RAKER dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 10.00 - Selesai secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Jenderal; 2. Kepala BPSDM; 3. Kepala BPIW. beserta jajaran.
5.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	RAPAT DENGAR PENDAPAT (Terbuka).	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Agustus 2022; - Membahas alokasi anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - RAKER dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2022 pukul

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2023.	13.00 - Selesai secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh 1. Inspektur Jenderal; 2. Kepala BPSDM-P; 3. Kepala BKT; 4. Kepala BPTJ. beserta jajarannya.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI)	–	RDPU (Audiensi) dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) membahas industri properti bidang perumahan dan pemukiman di Indonesia.	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022 secara Fisik.
2.	Masyarakat Jatikarya, Kota Bekasi		RDPU (Audiensi) dengan perwakilan masyarakat Jatikarya, Kota Bekasi membahas penyelesaian hak atas tanah milik masyarakat Jatikarya kota Bekasi yang digunakan untuk Pembangunan Tol Cimanggis - Cibitung I.	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022 secara Fisik.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI)		RDPU (Audiensi) dengan Gabungan Pelaksana konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) membahas pelaksanaan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis risiko.	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2022 secara Fisik.
4	KEMENTERIAN PUPR dan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	KUNJUNGAN SPESIFIK	Kunjungan Kerja ke : 1. Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, meninjau kegiatan normalisasi Kali Bekasi untuk pengendalian banjir. 2. Kota Serang, Provinsi Banten, meninjau peningkatan/revitalisasi terminal tipe A Pakupatan. 3. Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, meninjau Pembangunan Tol Cinere - Jagorawi Seksi III.	Kunsfik dilaksanakan tanggal 26-28 Agustus 2022.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU MIGAS	Rapat Intern	Presentasi Draft RUU Migas.	<p>Komisi VII menyampaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naskah Akademik. - Draft RUU Migas. - Sandingan UU Migas dengan RUU Migas. <p>Ke Masing-masing fraksi untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut dan hasilnya disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 20 September 2021.</p>

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2021. b. Progres Pelaksanaan Kegiatan TA. 2022. c. Pengantar RKA-K/L TA, 2021. 	-

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Kepala BRIN, Kepala BIG dan Kepala BAPETEN	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2021.	
3.	Menteri ESDM 2021	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2021. b. Progres Pelaksanaan Kegiatan TA. 2022. c. Pengantar RKA-K/L TA, 2021.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dengan menghadirkan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	Progres penanganan kebocoran gas PT Sorik Marapi Geothermal Power.	-
2.	Menteri Perindustrian RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	Penguatan Industri kecil menengah (IKM) sektor makanan dan minuman terkait antisipasi krisis pangan.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Direktur Utama PT Pertamina (Persero)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. Penjelasan dampak terkini ketidakstabilan harga <i>crude oil</i> terhadap subsidi dan kompensasi energi serta harga BBM. b. Progress rencana pembatasan BBM bersubsidi. c. Penjelasan terkait volume <i>crude oil</i> dan produk yang diimpor termasuk asal produk tersebut khususnya Tahun 2021 hingga 2022.	
4.	Kepala BRIN, Kepala BIG dan Kepala BAPETEN	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	Progres Pelaksanaan Kegiatan TA. 2022.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Agama RI	Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Pengawasan Pendidikan Keagamaan.	<ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala MAN Insan Cendikia Serpong, Pimpinan Pondok Pesantren GONTOR dan Kepala SMAK Negeri Samosir.Menggali informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan keagamaan tingkat menengah di MAN Insan Cendikia, Pondok Pesantren GONTOR dan SMAK Negeri Samosir, termasuk apa saja terobosan yang dilakukan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan.</p> <p>3. Mendorong Kementerian Agama untuk menyalurkan bantuan madrasah dan pesantren secara selektif, merata dan proporsional.</p> <p>4. Meminta Kementerian Agama untuk mengangkat tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang berstatus honorer untuk diangkat menjadi pegawai tetap.</p>	
2.	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH.	<p>1. Pentingnya menjaga sustainabilitas keuangan haji untuk memastikan jemaah haji yang belum berangkat dapat menikmati nilai manfaat dari pengelolaan keuangan haji.</p> <p>2. Meminta Dewan Pengawas BPKH untuk menyusun rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan haji.</p> <p>3. Meminta Badan Pelaksana BPKH untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja BPKH Periode 2017-2022.</p> <p>4. Meminta Badan Pelaksana BPKH untuk menyampaikan masukan</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			terhadap revisi Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.	
3.	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas BPKH Periode 2022-2027.	Berdasarkan hasil permusyawaratan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI atas hasil <i>fit and proper</i> Calon Anggota Dewan Pengawas BPKH Periode 2022-2027 diputuskan 5 nama yang terpilih, yakni Deni Suardini; Heru Muara Sidik; M. Dawud Arif Khan; Mulyadi dan Rojikin.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Ketenagakerjaan RI, tanggal 22 Agustus 2022	Rapat Kerja terkait: 1. Peluang dan Tantangan pembukaan kembali Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah pascamoratorium. 2. Penjelasan pengalihan status dan kondisi BLK UPTD di beberapa daerah menjadi UPTP Kementerian Ketenagakerjaan RI. 3. Penjelasan konsep, formulasi dan antisipasi Kementerian Ketenagakerjaan sehubungan dengan penetapan upah 2023.	1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi Kementerian Ketenagakerjaan RI terhadap upaya uji coba penempatan PMI ke Arab Saudi melalui <i>Technical Arrangement</i> Sistem Penempatan Satu Kamal (TA SPSK) Indonesia - Arab Saudi yang mulai berlaku per 11 Agustus 2022. 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk: a. Mengevaluasi jalur penempatan CPMI <i>unprosedural</i> dan memastikan Arab Saudi telah menghentikan kebijakan konversi visa WNI menjadi visa kerja pada sektor domestik. b. Meningkatkan kualitas sistem pelatihan vokasi di Balai	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Latihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dan kapasitas CPMI di luar sektor domestik.</p> <p>c. Meningkatkan koordinasi dengan BP2MI terkait kebijakan struktur biaya penempatan PMI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk lebih meningkatkan koordinasi dan sosialisasi formula Upah Minimum dengan instansi dan lembaga terkait</p> <p>4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan yang telah disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI paling lambat 29 Agustus 2022.</p>	
2.	BP2MI, tanggal 23 Agustus 2022	Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait: Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021	1. Setelah melakukan pembahasan dengan Kepala BP2MI, Komisi IX DPR RI menyetujui Laporan realisasi anggaran BP2MI TA 2021 yang terdiri dari:	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		(disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI)	<p>1.1. Realisasi Belanja sebesar Rp312.785.856.669 (Tiga Ratus Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau mencapai 98,67%; dan</p> <p>1.2. Realisasi Pendapatan berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.262.331.312.00 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah) atau mencapai 171,76%.</p> <p>2. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perpres Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	
3.	Tanggal 23 Agustus 2022, RDP dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana RI	Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2021.	Pemaparan laporan realisasi anggaran BKKBN RI Tahun Anggaran 2021.	Komisi IX menyetujui laporan realisasi anggaran BKKBN RI TA 2021.
4.	DPRD Provinsi Bengkulu dan Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan serta Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP - SPSI) Tanggal 24 Agustus 2022	Audensi Pimpinan Komisi IX dengan DPRD Provinsi Bengkulu dan Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan serta Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP - SPSI).	Menyampaikan pernyataan sikap terhadap UU Cipta Kerja, yaitu: 1. Mendesak pemerintah RI untuk mencabut UU No 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya karena UU tersebut dibentuk tidak sesuai dengan aturan dan sistem pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No 12 Tahun 2011 (UU PPP) dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK dengan putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020. 2. Mendesak kepada pemerintah RI untuk mengembalikan peraturan ketenagakerjaan kepada UU No 13 Tahun 2003 serta peraturan turunannya.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Meminta kepada DPRD provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi dan secara bersama-sama dengan Pengurus Daerah FSP Pertanian dan Perkebunan-SPSI (PD FSPPP-SPSI) Provinsi Bengkulu menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI di Jakarta.	
5.	Tanggal 24 Agustus 2022, RDP dengan Kementerian Kesehatan RI	Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2021.	Pemaparan laporan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2021.	Komisi IX menyetujui laporan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI TA 2021.
6.	Tanggal 24 Agustus 2022, RDP dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI	Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2021.	Pemaparan laporan realisasi anggaran BPOM RI Tahun Anggaran 2021.	Komisi IX menyetujui laporan realisasi anggaran BPOM RI TA 2021.
7.	Kementerian Ketenagakerjaan RI, tanggal 25 Agustus 2022	Rapat Kerja terkait: Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021 (disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI).	1. Komisi IX DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>a. Realisasi Belanja sebesar Rp.12.184.971.139.359,00 (Dua Belas Triliun Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).</p> <p>b. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.1.215.029.212.176,00 (Satu Triliun Dua Ratus Lima Belas Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).</p> <p>2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mempercepat langkah-langkah perbaikan sebagaimana catatan dan rekomendasi dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021.</p>	
8.	Kunjungan Kerja Spesifik, tanggal 26-28 Agustus 2022	Kunspek Tenaga Kerja Honorer: ke Provinsi: 1. Jawa Barat. 2. Sumatera Utara.	1. Provinsi Jawa Barat , dengan temuan atau kesimpulan sebagai berikut: a. Memperhatikan dan melakukan advokasi yang serius terhadap Tenaga Kerja Honorer Khususnya	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		3. Kalimantan Timur.	<p>Bidang Kesehatan karena mereka menjadi ujung tombak sehingga sangat di butuhkan apalagi mereka telah bekerja secara serius di saat Pandemi.</p> <p>b. Menghendaki dan Penundaan Implementasi tidak dilakukan November 2023 sehingga dapat mengatur Tenaga Kerja Honorer untuk dimasukkan dalam P3K.</p> <p>c. Kementerian Kesehatan diharapkan melakukan audit penempatan sehingga tidak ada tempat yang kosong dan lebih optimal penempatan posisi dokter-dokter spesialis di Puskesmas ataupun Fasyankes.</p> <p>d. Komisi IX akan berupaya memperhatikan tenaga honorer khususnya di bidang kesehatan dan non kesehatan.</p> <p>e. Pemerintah Provinsi telah merencanakan pembentukan Gugus Tugas Tenaga Kerja Honorer dan akan melibatkan instansi terkait baik tenaga kerja Honorer Kesehatan maupun non kesehatan.</p> <p>f. Ketidaksanggupan Pemerintah Provinsi Jabar jika biaya-biaya tunjangan pegawai P3K</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>diserahkan ke Pemerintah Daerah dan diharapkan ada <i>share</i> dari Pemerintah Pusat.</p> <p>2. Provinsi Sumatera Utara, dengan catatan atau pembahasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan tenaga kerja honorer kesehatan di Provinsi Sumatera: <ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan pengguna, tenaga kerja kesehatan honorer terdapat di Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu (Pustu) di tingkat Provinsi dan Kab/Kota. Jumlah tenaga kerja kesehatan saat ini di Sumatera Utara mencapai 12.651. b. Disamping itu, terdapat pula tenaga kerja kesehatan honorer yang bekerja sebagai petugas kesehatan untuk membantu seperti supir, <i>security</i> atau pengurus kebersihan. Jumlah tenaga kerja kesehatan honorer tersebut telah diusulkan ke 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan saat ini dalam proses pengangkatan lebih dari 5000 orang.</p> <p>2. Perlindungan kesejahteraan tenaga kesehatan honorer meliputi pemenuhan hak-hak normatif antara lain, gaji/upah, jaminan sosial ditemukan:</p> <p>a. Tenaga kerja kesehatan honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera memperoleh gaji sebesar Rp3 juta, bahkan untuk dokter spesialis mencapai 15 juta per bulan. Standar gaji pekerja honorer di lingkungan Pemprov SDH diatas UMR, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tentang upah Kementerian Ketenagakerjaan. Jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan juga telah dipenuhi dari anggaran Pemprov.</p> <p>b. Berbeda dengan tenaga kesehatan honorer di lingkungan Pemkab/Pemkot di Sumatera Utara, mereka memperoleh gaji/upah sesuai</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>anggaran Pemda, gaji/upah hanya sebesar Rp1,2 juta dibawah UMR, dan jaminan kesehatan yang diikuti masih dibayarkan secara mandiri.</p> <p>c. Dalam rangka meningkatkan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja honorer di Provinsi Sumatera Utara, pemprov bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berkomitmen akan berkoordinasi untuk meningkatkan anggaran bagi tenaga kerja honorer yang berada di dalam tanggung jawab dan tugas masing-masing OPD</p> <p>3. Provinsi Kalimantan Timur, dengan temuan atau fokus pembahasan sebagai berikut:</p> <p>a. Tenaga honorer di Provinsi Kalimantan Timur, banyak yang mendapat upah melalui dana BLUD.</p> <p>b. OPD mengusulkan agar gaji tenaga honorer yang semula berasal dari BLUD, apakah skema dukungan anggaran bisa dialihkan ke dana DAK atau DAU.</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> c. Tim Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah Daerah memberikan skema peralihan gaji tenaga honorer dari BLUD ke DAU atau DAK. d. Kebijakan MenPan RB ini tentunya akan memengaruhi pelayanan masyarakat dan ditakutkan terjadi kelumpuhan, sehingga kebijakan tentunya harus melibatkan semua sector. e. Dari pusat, harus ada keterlibatan publik. Sementara di daerah juga harus menjadi fokus diskusi dan dicari jalan terbaik. f. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah Daerah Kalimantan Timur untuk juga memperhatikan tenaga PTKS yang bekerja secara sukarela sebab mereka tidak termasuk dalam golongan tenaga kesehatan, sehingga data mereka tidak diterima oleh pusat pendataan. g. Usulan dari PPNI dan IBI, agar mereka diberikan perlakuan khusus untuk seleksi perekrutan PPPK sehingga tidak kalah bersaing dengan <i>fresh graduate</i>. <ul style="list-style-type: none"> - Meminta agar ada afirmasi bagi pegawai dengan bobot 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			kerja sehingga pegawai yang lama mendapat kesempatan menjadi PPPK.	
9.	Tanggal 30 Agustus 2022, RDP dengan Kementerian Kesehatan RI, BPOM RI, PT. Biofarma	Mendengarkan Penjelasan dari Mitra Kementerian Kesehatan RI, BPOM RI, PT. Biofarma terkait penanganan covid 19 dan strategiantisipasi penyebaran cacar monyet.	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan penanganan Pandemi Covid-19 dan strategi <i>surveilans</i> terhadap varian baru melalui penguatan <i>surveilans</i> dengan <i>sekuensing genom</i>. - Penjelasan implemmtasi program vaksinasi Covid-19 termasuk booster anak dan booster kedua kelompok prioritas. - Penjelasan Antisipasi penyebaran cacar monyet yang telah ditetapkan WHO sebagai Darurat Kesehatan Global. 	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Tanggal 22 Agustus 2022, Rapat Audiensi Komisi IX DPR RI dengan Komite Nasional Pengendalian Tembakau	<ul style="list-style-type: none"> - Komnas pengendalian tembakau berfokus pada perlindungan anak dan masyarakat pra-sejahtera dari konsumsi zat adiktif. - Memantau efektivitas kendali rokok melalui iklan hidup sehat dan melakukan simplikasi golongan cukai 	Komisi IX DPR RI menerima dan mengapresiasi masukan dari semua pihak yang diundang, selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Komisi IX DPR RI.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>untuk mencegah harga rokok yang lebih murah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah dana cukai rokok untuk substitusi tani tembakau. - Mendorok masing-masing Pemerintah Daerah agar menerapkan Kawasan tanpa rokok. 		
2.	<p>Tanggal 29 Agustus 2022 Rapat Audiensi Komisi IX DPR RI dengan Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI)</p>		<p>Komisi IX DPR RI menerima dan mengapresiasi masukan dari semua pihak yang diundang, selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Komisi IX DPR RI.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	RUU Kepariwisataan	29 Agustus 2022 Rapat Inter Panja RUU Kepariwisataan.	Panja RUU Kepariwisataan menyetujui Jadwal Kegiatan Panja RUU Kepariwisataan pada Masa Sidang I (Satu) Tahun Sidang 2022-2023, dengan prioritas kegiatan yaitu kunjungan kerja dan pendalaman substansi RUU bersama Kemenparekraf.	
2	---	18 Agustus 2022 Rapat Intern Komisi Memutuskan 2 RUU sebagai RUU Prolegnas Prioritas tahun 2023.	RUU Kepariwisataan. RUU tentang Revisi UU Kepemudaan.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kemendikbudristek-RI	Raker 1. Pembahasan RKA K/L dan RKP TA 2023	1. Mendikbudristek RI menyampaikan pagu anggaran berdasarkan nota keuangan RAPBN TA 2023 sebesar Rp80.221.010.125.000,- dan mengajukan usulan tambahan	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Kemendikbudristek RI. 2. Pembahasan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK.	pagu sebesar Rp10.145.822.090.000,- . 2. Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman terhadap pagu anggaran dan usulan tambahannya dan akan melakukan pendalaman melalui RDP dengan eselon I Kemendikbudristek RI dalam waktu dekat.	
2	Perpusnas RI	RDP 1. Pembahasan RKA K/L dan RKP TA 2023 Perpusnas RI. 2. Pembahasan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK.	1. Perpusnas RI menyampaikan pagu anggaran berdasarkan nota keuangan RAPBN TA 2023 sebesar Rp723.040.156.000 (<i>tujuh ratus dua puluh tiga miliar empat puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah</i>). 2. Perpusnas RI menyampaikan dana dekonsentrasi sebesar Rp12.212.092.000 (<i>dua belas miliar dua ratus dua belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah</i>), dengan target 33 perpustakaan Provinsi untuk pembinaan administrasi keuangan, pendataan perpustakaan, <i>workshop</i> pegiat literasi daerah dan lomba perpustakaan sekolah. 3. Perpusnas RI menyampaikan pagu DAK fisik Penugasan sub Bidang Perpustakaan TA 2023 sebesar	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Rp525.000.000.000 (<i>lima ratus dua puluh lima miliar rupiah</i>). 4. Komisi masih perlu melakukan pendalaman.	
3	Kemenparekraf/ Baparekraf RI	Raker 1. Pembahasan RKA K/L dan RKP TA 2023 Kemenparekraf/ Baparekraf RI. 2. Pembahasan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK.	1. Menparekraf/Kepala Baparekraf RI menyampaikan bahwa berdasarkan Nota Keuangan RAPBN TA 2023, pagu anggaran/ sementara Kemenparekraf/Baparekraf RI sebesar Rp3.381.345.168.000 (<i>tiga triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah</i>) dan mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp4.186.990.000.000 (<i>empat triliun seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah</i>) 2. Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman terhadap usulan anggaran dari Kemenparekraf/Baparekraf	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kemendikbudristek RI/Pendidikan - Kebudayaan	Kamis, 18 Agustus 2022 Rapat Intern Komisi X DPR RI.	Selain menyepakati agenda-agenda pengawasan di MS I, Komisi X DPR RI menambahkan agenda berikut:	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Program Kerja Fungsi Pengawasan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Komisi X DPR RI MS I TS 2022-2023. 2. Rencana Kunker Luar Negeri, Kunker Spesifik, dan Kunker Reses Komisi X DPR RI pada MP I TS 2022-2023. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengagendakan rapat gabungan Komisi X DPR RI bersama Komisi II dan Komisi XI terkait persoalan guru honorer. 2. Mengagendakan RDPU soal kenaikan tarif masuk Borubudur, Taman Nasional Komodo dengan Pelaku Wisata Labuan Bajo, Dinas Pariwisata NTT, BPO Labuan Bajo, PT Flobamora (calon pengelola TN Komodo) dan pihak terkait lainnya. 	
2.		<p>22 Agustus 2022 Rapat Intern Panja Perguruan Tinggi.</p> <p>Agenda: Menyusun TOR dan Jadwal Program Kerja Panja.</p>	<p>Menyepakati agenda-agenda Panja Perguruan Tinggi. Panja ini awalnya dibentuk untuk memperkuat peran perguruan tinggi swasta dengan nama Panja Perguruan Tinggi Swasta, namun berubah menjadi Panja Perguruan Tinggi untuk mengevaluasi tata kelola kebijakan pendidikan tinggi secara keseluruhan termasuk perguruan tinggi.</p> <p>(Hasil Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 23 Agustus 2022).</p>	
3.		<p>22 Agustus 2022 RDPU Komisi X DPR RI Dengan:</p>	<p>Komisi X DPR-RI menyampaikan catatan antara lain:</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, Dan Ratu Boko. 2. Badan Otorita Borobudur. 3. Dinas Pariwisata Provinsi DIY. 4. Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. 5. Dinas Pariwisata NTT. 6. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo. 7. PT Flobamora. <p>Agenda: Membahas kenaikan tarif masuk destinasi wisata Candi Borobudur dan Taman Nasional Pulau Komodo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi X DPR RI akan mendorong pemerintah (K/L terkait yang melaksanakan anggaran pariwisata) untuk menghitung kebutuhan anggaran terkait kepentingan konservasi di destinasi pariwisata seperti TNK dan Candi Borobudur, yang selanjutnya menjadi dasar kepastian menentukan tarif masuk ke destinasi tersebut. 2. Komisi X DPR RI juga mendorong dalam konteks kepentingan diplomasi, edukasi, riset/ilmu pengetahuan dan pengenalan sejarah serta budaya, rencana kebijakan menaikkan tarif masuk ke TNK dan Candi Borobudur harus ditentukan dengan kriteria yang jelas, utamanya dalam hal ketentuan besaran harga tarifnya. 	
4.		<p>23 Agustus 2022 Rapat Kerja Komisi X DP RI dengan Mendikbudristek RI.</p> <p>Agenda: 1. Penyerahan Laporan Panja Kebijakan Kurikulum.</p>	<p>Komisi X DPR-RI menyampaikan catatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi X DPR RI menyerahkan Laporan Hasil Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Kurikulum kepada Mendikbudristek RI. Selanjutnya mendesak Kemendikbudristek RI segera menindaklanjuti rekomendasi Panja Kebijakan Kurikulum dan 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		2. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021. 3. Lain-lain.	menyampaikan perkembangan tindak lanjutnya secara tertulis kepada Komisi X DPR RI pada masa sidang berikutnya. 2. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemendikbudristek RI atas capaian Opini BPK Tahun Anggaran 2021 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut (2013-2021), serta capaian realisasi 95,48% anggaran tahun 2021 dari Pagu APBN. Dengan catatan menindaklanjuti catatan-catatan hasil pemeriksaan dari BPK, dan menyesalkan atas rendahnya penetapan dan capaian target oleh Kemendikbudristek RI terhadap program dan kegiatan penguatan karakter dan peningkatan kualitas pembelajaran serta relevansi pendidikan.	
5.		25 Agustus 2022 RDPU Komisi X DPR RI dengan Kebaya <i>Foundation</i> . Agenda: Audiensi untuk mengajukan	Komisi X DPR-RI menyampaikan catatan antara lain: 1. Komisi X DPR RI Mendukung upaya pengajuan pendaftaran Kebaya sebagai Warisan Budaya Dunia ke UNESCO secara <i>Single Nomination</i>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Hari Kebaya Nasional, Kebaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional, dan Kebaya sebagai Warisan Budaya Dunia (UNESCO)</p>	<p>agar Kebaya menjadi Identitas Busana Nasional Indonesia. 2. Komisi X DPR RI juga mendukung usulan kepada Pemerintah untuk menetapkan Hari Kebaya Nasional sebagai sebuah perayaan besar sekaligus pengangkatan fungsi pariwisata dan ekonomi masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 untuk memajukan kebudayaan, serta selaras dengan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.</p>	
6.		<p>30 Agustus 2022 Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek RI.</p> <p>Agenda: Informasi tentang proses penyelesaian Eks PLPG 2016 Seluruh Indonesia sesuai RDPU tanggal 23 Mei 2022.</p>	<p>Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk segera menyelesaikan permasalahan Guru Eks.PLPG Tahun 2016 dengan memperhatikan catatan RDPU tanggal 23 Mei 2022.</p>	
7.	<p>Kemenpora RI / Olahraga – Pemuda</p>	<p>18 Agustus 2022 Rapat Intern Komisi X DPR RI.</p>		

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Program Kerja Fungsi Pengawasan Bidang Olahraga dan Pemuda Komisi X DPR RI MS I TS 2022-2023. 2. Rencana Kunker Luar Negeri, Kunker Spesifik, dan Kunker Reses Komisi X DPR RI pada MP I TS 2022-2023. 		
8.		<p>24 Agustus 2022 Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI.</p> <p>Agenda : Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021.</p>	<p>Komisi X DPR-RI menyampaikan catatan antara lain, mendorong Kemenpora RI agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam merealisasikan APBN TA 2022 dan penyusunan RAPBN TA 2023, perlu dilakukan dengan basis evaluasi dari LKPP APBN TA 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. 2) memperkuat program, kegiatan dan anggaran bidang kepemudaan yang proporsional antara target dan sasaran, serta memperkuat akses dan informasi kepemudaan di wilayah 3T, sebagai strategi dalam menghadapi bonus demografi. 3) memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan Cabor 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Sepakbola, mulai dari pembibitan, kepelatihan, kompetisi, termasuk edukasi bagi suporter.	
9.	Kemenparekraf RI / Kepariwisata - Ekraf	<p>18 Agustus 2022 Rapat Intern Komisi X DPR RI.</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Program Kerja Fungsi Pengawasan Bidang Pariwisata dan Ekraf Komisi X DPR RI MS I TS 2022-2023. 2. Rencana Kunker Luar Negeri, Kunker Spesifik, dan Kunker Reses Komisi X DPR RI pada MP I TS 2022-2023. 		
10.		<p>24 Agustus 2022 Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menparekraf RI.</p> <p>Agenda : Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021.</p>	<p>Komisi X DPR-RI menyampaikan catatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemenparekraf/Baparekraf RI atas capaian opini BPK Tahun 2021 dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan realisasi anggaran sebesar 95,77%. 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Selanjutnya Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mempertahankan capaian opini WTP dari BPK dan mendorong agar realisasi anggarannya dapat ditingkatkan di atas capaian rata-rata nasional untuk tahun-tahun mendatang.</p> <p>2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI berkoordinasi dengan K/L terkait untuk tetap mempertahankan program-program tahun 2021 terkait mitigasi terhadap pelaku pariwisata dan ekraf yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2021, seperti bantuan insentif pemerintah, bantuan pemerintah bagi usaha pariwisata (BPUP), peningkatan kapasitas SDM, dan reaktivasi industri pariwisata.</p>	
11.	Perpustakaan Nasional RI / Literasi	<p>25 Agustus 2022 RDP dengan Kepala Perpustakaan RI.</p> <p>Agenda:</p>	<p>Komisi X DPR RI memberikan pandangan untuk mendorong Perpustakaan RI agar:</p> <p>1. evaluasi LKPP Tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021.	<p>merealisasikan APBN Tahun 2022 dan penyusunan program pada RAPBN Tahun 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. memperkuat tata kelola Pustakawan daerah, memiliki peta jaringan internet sebagai basis program <i>e-library</i>, optimalisasi program perpustakaan komunitas, dan memperbaiki manajemen perpustakaan daerah, terutama dalam layanan perpustakaan digital. 3. memberikan perhatian terhadap keterbatasan sarana prasarana perpustakaan di daerah 3T, penguatan bacaan PAUD, peningkatan akses i-pusnas, fasilitasi ketersediaan dokumen-dokumen sejarah dan program untuk mempertahankan koleksi langka. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																								
1.	Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Kepala Badan Pusat Statistik	1. Pembahasan Asumsi Dasar dalam RUU APBN Tahun 2023; 2. Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar dalam RUU APBN Tahun 2023.	1. Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Sasaran Pembangunan, dan Indikator Pembangunan dalam RAPBN 2023 sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">NO</th> <th style="text-align: center;">INDIKATOR</th> <th style="text-align: center;">RAPBN 2023</th> <th style="text-align: center;">KESEPAKATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)</td> <td style="text-align: center;">5,3</td> <td style="text-align: center;">5,3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Inflasi (% YoY)</td> <td style="text-align: center;">3,3</td> <td style="text-align: center;">3,6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)</td> <td style="text-align: center;">14.750</td> <td style="text-align: center;">14.800</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)</td> <td style="text-align: center;">7,9</td> <td style="text-align: center;">7,9</td> </tr> </tbody> </table>	NO	INDIKATOR	RAPBN 2023	KESEPAKATAN	ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO				1.	Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,3	5,3	2.	Inflasi (% YoY)	3,3	3,6	3.	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	14.750	14.800	4.	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,9	7,9	Rapat Kerja tanggal 31 Agustus 2022
NO	INDIKATOR	RAPBN 2023	KESEPAKATAN																									
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO																												
1.	Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,3	5,3																									
2.	Inflasi (% YoY)	3,3	3,6																									
3.	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	14.750	14.800																									
4.	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,9	7,9																									

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT				KETERANGAN
			SASARAN PEMBANGUNAN				
			1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0	5,3 – 6,0	
			2.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 – 8,5	7,5 – 8,5	
			3.	Gini Rasio (indeks)	0,375 – 0,378	0,375 – 0,378	
			4.	IPM (indeks)	73,31 – 73,49	73,31 – 73,49	
			INDIKATOR PEMBANGUNAN				
			1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	105 – 107	105 – 107	
			2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107 - 108	107 - 108	
			<p>2. Dengan Proyeksi Asumsi Makro RAPBN 2023 sebagai acuan penyusunan APBN 2023, maka Pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas memperkuat pelaksanaan reformasi struktural diseluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat mendorong transformasi ekonomi dan menopang pertumbuhan ekonomi. 2) Kementerian PPN/Bappenas memastikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 				

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>menopang pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui program-program Kementerian/Lembaga yang dapat menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.</p> <p>3) Kementerian PPN/Bappenas akan menyampaikan indikasi kegiatan Kementerian/Lembaga diseluruh Kabupaten/Kota dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 kepada Komisi XI DPR RI.</p> <p>4) Kementerian PPN/Bappenas menghimpun dan menganalisis pelaksanaan reformasi struktural disetiap Kementerian/Lembaga, dan ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja tertentu, dan hasil analisis disampaikan kepada Komisi XI DPR RI.</p> <p>5) Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga beserta Pemerintah Daerah untuk memformulasikan bauran kebijakan yang dapat mengendalikan inflasi, baik dari sisi <i>supply</i>, distribusi, dan dari sisi <i>demand</i>.</p> <p>6) Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>upaya pendalaman pasar keuangan, efektifitas konsolidasi fiskal, pengelolaan utang yang efektif menghadapi kondisi pasar, dan lain sebagainya yang dapat menahan kenaikan <i>yield</i> Surat Berharga Negara (SBN).</p> <p>7) Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan dalam menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya yang mendukung upaya pengendalian inflasi, stabilitas makro ekonomi, dan pemulihan perekonomian.</p> <p>8) Otoritas Jasa Keuangan memperkuat kebijakan Sektor Jasa Keuangan untuk menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi pada sektor-sektor prioritas dan UMKM, menjaga ketahanan dan stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan memitigasi <i>scarring effect</i> akibat pandemi.</p> <p>3. Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Kepala BPS akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI maksimal 7 hari kerja.</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Keuangan	Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dalam APBN TA 2021.	Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan menyepakati, hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun 2021.2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian kinerja laporan keuangan Kementerian Keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk APBN Tahun Anggaran 2021 dan WTP yang ke-11 secara berturut-turut.3. Kementerian Keuangan akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam APBN.4. Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan rekomendasi Komisi XI DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2021, secara	Rapat Kerja tanggal 24 Agustus 2022.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>5. Kementerian Keuangan akan melaporkan evaluasi pelaksanaan kualitas belanja K/L, Belanja Daerah, Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada APBN 2021.</p> <p>6. Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara, akan menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Negara Tahun 2023, yang dapat meningkatkan kualitas belanja yang lebih produktif dirasakan oleh rakyat dan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri di setiap K/L.</p> <p>7. Menteri Keuangan akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Menteri PPN/Kepala Bappenas	Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas RI dalam APBN TA 2021.	<p>Komisi XI DPR RI bersama Menteri PPN/Bappenas RI menyepakati, hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021. 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian kinerja laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk APBN Tahun Anggaran 2021 dan WTP yang ke-14 secara berturut-turut. 3. Kementerian PPN/Bappenas akan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan rekomendasi Komisi XI DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2021, secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Kementerian PPN/Bappenas akan meningkatkan kinerja pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk pembangunan nasional yang berkualitas. 	Rapat Kerja tanggal 24 Agustus 2022.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>5. Kementerian PPN/Bappenas akan membuat laporan hasil pemantauan dan pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2021, yang dapat memperlihatkan kinerja K/L dalam mencapai target-target rencana pembangunan (prioritas nasional dan non prioritas) dan penggunaan produk dalam negeri dalam program-program pembangunan nasional di K/L.</p> <p>6. Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan kewenangannya merancang RKP, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi pembangunan nasional, akan meningkatkan kualitas pembangunan nasional dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam program-program pembangunan nasional di seluruh K/L pada Tahun 2023.</p> <p>7. Menteri PPN/Kepala Bappenas akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	
3.	Sekjen BPK RI	Pembahasan Laporan Keuangan	Komisi XI DPR RI dan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyepakati:	RDP tanggal 25 Agustus 2022.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		BPK RI dalam APBN TA 2021.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan laporan keuangan BPK RI tahun 2021. 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian kualitas laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk APBN Tahun Anggaran 2021 dan WTP yang ke-15 secara berturut-turut. 3. BPK RI akan menindaklanjuti rekomendasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan rekomendasi Komisi XI DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan KAP terhadap Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2021, secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. BPK RI menyampaikan Laporan Tindaklanjut atas seluruh Hasil Pemeriksaan KAP dari tahun-tahun sebelumnya hingga Tahun 2021 beserta status perkembangannya. 5. BPK RI akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam APBN. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>6. BPK RI menyampaikan: Ikhtisar Laporan Keuangan dan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan BPK RI; Laporan Ikhtisar Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK atas pelaksanaan APBN Tahun 2021 oleh Kementerian/Lembaga sampai dengan Tahun 2021 beserta status perkembangannya.</p> <p>7. BPK RI akan memberikan akses kepada Komisi XI DPR RI untuk mendapatkan informasi LHP BPK melalui portal <i>website</i> di BPK RI.</p> <p>8. Sekjen BPK RI akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	
4.	Kepala BPS RI dan Kepala LKPP	Pembahasan Laporan Keuangan BPS dan LKPP dalam APBN TA 2021.	<p>Komisi XI DPR RI dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyepakati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan laporan keuangan BPS dan LKPP tahun 2021. 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian kualitas laporan keuangan 	RDP tanggal 25 Agustus 2022

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>BPS dan LKPP yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk APBN Tahun Anggaran 2021.</p> <p>3. BPS dan LKPP akan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan rekomendasi Komisi XI DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan BPS dan LKPP Tahun Anggaran 2021, secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. BPS dan LKPP menyampaikan Laporan Tindaklanjut atas seluruh Hasil Pemeriksaan BPK RI dari tahun-tahun sebelumnya hingga Tahun 2021 yang terdiri dari jumlah temuan, rekomendasi, tindak lanjut, dan status perkembangannya.</p> <p>5. BPS dan LKPP akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam APBN.</p> <p>6. BPS agar meningkatkan kualitas data statistik yang dapat digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan bagi Pemerintah dan menjamin</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas bagi masyarakat.</p> <p>7. LKPP agar memastikan kemudahan bagi <i>stakeholder</i> dalam menjalankan/mengakses belanja pemerintah, terutama untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi.</p> <p>8. Kepala BPS dan Kepala LKPP akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	
5.	Menteri Keuangan	<i>Right Issue</i> PT. Waskita Karya, Tbk., PT. Adhi Karya, Tbk., PT. Semen Indonesia, Tbk., PT. BTN, Tbk., dan Privatisasi PT. Semen Kupang (Persero).	<p>Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan menyepakati, hal-hal sebagai berikut :</p> <p>1. Komisi XI DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Keuangan mengenai rencana Privatisasi pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk, dan PT. Semen Kupang (Persero) Tbk Tahun 2022 yang akan menjadi bahan pengawasan bagi Komisi XI DPR RI.</p>	Rapat Kerja tanggal 29 Agustus 2022.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2. Pembahasan lebih lanjut mengenai rencana Privatisasi pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Semen Indonesia (Persero), dan PT. Semen Kupang (Persero) Tbk Tahun 2022 akan dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu tanggal 12 sampai dengan 15 September 2022.</p>	
6.	Kepala BPKP	Pembahasan Laporan Keuangan BPKP dalam APBN TA 2021.	<p>Komisi XI DPR RI dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI menyepakati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan laporan keuangan BPKP tahun 2021. 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian kualitas laporan keuangan BPKP yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk APBN Tahun Anggaran 2021 dan WTP yang ke-14 secara berturut-turut. 3. BPKP akan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan rekomendasi Komisi XI DPR RI atas Laporan Hasil 	RDP tanggal 30 Agustus 2022.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan BPKP Tahun Anggaran 2021, secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. BPKP akan menyampaikan Laporan Tindaklanjut atas seluruh Hasil Pemeriksaan BPK dari tahun-tahun sebelumnya hingga Tahun 2021 beserta status perkembangannya. 5. BPKP akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam APBN. 6. BPKP menyampaikan: Ikhtisar Penugasan, Rekomendasi Strategis, dan Laporan Tindak Lanjut dan Prestasi Kerja BPKP Tahun 2021 atas pelaksanaan APBN terhadap Kementerian/Lembaga/Daerah/BUM N beserta status perkembangannya. 7. Kepala BPKP akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI (BALEG)

AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
Badan Legislasi	1. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pengesahan jadwal acara rapat-rapat Baleg Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023. (tgl 16 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB).
	2. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) dalam rangka mendengarkan pandangan/masukan terkait harmonisasi RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). (tgl 18 Agustus 2022, pukul 09.00 WIB).
	3. Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Menteri Keuangan RI dalam rangka mendengarkan pandangan/masukan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). (18 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB).
	4. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul/Pimpinan Komisi XI atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). (18 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB).
	5. Rapat Badan Legislasi DPR RI dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul/Pimpinan Komisi II DPR RI atas 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi (Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Kalimantan Tengah. (22 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB).
	6. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dengan Pengusul RUU/Pimpinan Komisi XI terkait harmonisasi RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). (22 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB).
	7. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dengan Pengusul RUU/Pimpinan Komisi XI terkait harmonisasi RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) (23 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB).
	8. Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan PPUU DPD RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 (24 Agustus 2022, pukul 14.00 WIB).

AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
	9. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan atas hasil harmonisasi RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) (24 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB).
	10. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka menerima audiensi dari Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) penyampaian penjelasan usulan RUU tentang Pengadilan Medis dalam Prolegnas. (25 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB).
	11. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dengan Pengusul RUU/Pimpinan Komisi II dalam rangka membahas hasil kajian harmonisasi atas 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi (Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Kalimantan Tengah. (25 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB).
	12. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 (25 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB).
	13. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dengan Pengusul RUU/Pimpinan Komisi II dalam rangka melanjutkan hasil kajian harmonisasi atas 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi (Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Kalimantan Tengah. (30 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB).

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSR - BKSAP	<i>Consultative Workshop "The Role of Parliaments in Promoting Inclusive and Sustainable Responses to Health Emergencies: Case Studies on Effectiveness and Impediments in National COVID-19 Responses".</i>	<p>Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Vanda Sarundajang (F-PDIP), menghadiri <i>consultative workshop "The Role of Parliaments in Promoting Inclusive and Sustainable Responses to Health Emergencies: Case Studies on Effectiveness and Impediments in National COVID-19 Responses"</i>, yang diselenggarakan oleh Parlemen Cambodia dan <i>Parliamentary Centre of Asia</i>, pada tanggal 10-11 Agustus 2022, di Siem Reap, Cambodia.</p> <p>Sebagai salah satu panelis dari <i>workshop</i> tersebut, Vanda Sarundajang menjabarkan bahwa Parlemen, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, mempunyai peran penting dalam memastikan seluruh program pemerintah terkait COVID-19, termasuk vaksin dan telemedisin, dapat mudah diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk yang rentan dan tinggal di daerah terpencil.</p> <p>Dalam hal tersebut, mengintegrasikan prinsip <i>non-discrimination, equality, accountability</i> dan juga <i>participation</i> di dalam proses pengambilan keputusan dan aktivitas Parlemen lainnya</p>	10-11 Agustus 2022.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>menjadi bagian yang sangat penting untuk diimplementasikan.</p> <p>Dalam penutupannya, Vanda menyampaikan bahwa DPR RI, melalui BKSAP akan tetap berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Parlemen negara lain demi tercapainya kesehatan masyarakat (<i>public health</i>) yang inklusif, termasuk dalam skema transisi pandemi ke endemi.</p>	
2.	KSR - BKSAP	<i>AIPA Delegation Visit to India.</i>	<p>Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon (FP-Gerindra) melakukan kunjungan ke India sebagai bagian dari Delegasi ASEAN <i>Inter-Parliamentary Assembly</i> (AIPA) pada 10-14 Agustus 2022. Kunjungan ini merupakan bagian dari perayaan ke-30 tahun hubungan ASEAN-India yang telah terjalin sejak tahun 1992.</p> <p>Salah satu pertemuan penting dengan Wakil Presiden India sekaligus Ketua Majelis Tinggi Parlemen India (Rajya Sabha) di Sansad Bhavan Kompleks Parlemen pada Jumat (12/8/2022).</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKSAP menyampaikan harapannya terhadap hubungan ASEAN-India yang lebih kuat. Menurutnya, saat ini ASEAN menghadapi tantangan geopolitis dan geoekonomi yang semakin masif seiring menguatnya perhatian dunia terhadap kawasan</p>	10 – 15 Agustus 2022.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Indo-Pasifik yang menjadikan ASEAN sebagai arena persaingan antar kekuatan dunia di berbagai bidang mulai dari ekonomi, perdagangan, politik, dan sosial budaya. Karena itu, Fadli menyambut baik partisipasi aktif India di ASEAN seperti yang tertuang dalam komitmen bersama mengenai <i>Cooperatin on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific</i> untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan bersama.</p> <p>Kunjungan ini sangat penting mengingat mulai November tahun ini Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN dan AIPA.</p> <p>Delegasi AIPA dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen Kamboja yang saat ini memegang keketuaan ASEAN. Selain Indonesia, turut hadir pula perwakilan parlemen Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Laos.</p>	
3.	KSB - BKSAP	RAPIM KE-33 BKSAP DPR RI.	<p>Ketua Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD) memimpin Rapat Pimpinan BKSAP ke-33 yang berlangsung secara <i>hybrid</i> pada Selasa, 16 Agustus 2022.</p> <p>Turut hadir dalam rapat diantaranya Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Fadli Zon, S.S. M.Sc. (F-PGerindra) dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI yaitu Gilang Dhielafararez, S.H.,LL.M (F-PDIP); dan Dr. H. Mardani Ali Sera (F-PKS).</p>	16 Agustus 2022.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Rapat membahas terkait Program BKSAP di Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, khususnya terkait persiapan penyelenggaraan <i>The 8th G-20 Parliamentary Speaker's Summit</i> (P-20) dan undangan kepada DPR RI dalam sidang-sidang internasional seperti IPU, WAIPA, PUIC dan <i>Women Leaders</i> (WPL) 2022. Tidak hanya itu, rapim juga berupaya mencari solusi atas rencana kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dan kunjungan perorangan guna meningkatkan hubungan kerja sama dengan parlemen-parlemen dari negara sahabat.</p>	
4.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Wakil Ketua BKSAP DPR RI dengan Dubes Slovakia.	<p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (F-PD) menerima kunjungan kehormatan atau <i>courtesy call</i> Duta Besar Slovakia untuk Indonesia H.E. Jaroslav Chlebo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Pertemuan yang merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan diplomasi pada Juni 2022 lalu yang membahas berbagai hal terkait upaya meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Slovakia.</p> <p>Hubungan diplomatik Indonesia-Slovakia yang telah terjalin selama hampir 30 tahun, telah menghasilkan berbagai perjanjian bilateral yang telah ditandatangani antara Pemerintah</p>	18 Agustus 2022.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Indonesia dan Pemerintah Slovakia. Kunjungan Tingkat Tinggi juga telah dilakukan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati dan tahun 2011 dilakukan kunjungan balasan oleh Presiden Slovakia ke Indonesia.</p> <p>Sejumlah sektor prioritas yang menjadi fokus kerja sama antara lain: Ketahanan Pangan, Energi Terbarukan, Perdagangan dan Investasi, Pertanian dan Kehutanan, Media Massa dan Penyiaran, Pendidikan Tinggi, Pariwisata, <i>People-to-people Contact</i>, Kebudayaan, dan Pertahanan.</p> <p>Sebagai informasi tambahan, beberapa perguruan tinggi di Indonesia (seperti Universitas Andalas dan IPB) juga telah menjalin kerja sama antar universitas di Slovakia. Kedepannya, Pemerintah dan Parlemen akan mendukung dan mendorong kerja sama pendidikan/ perguruan tinggi agar semakin banyak dilakukan. Tidak hanya sektor pendidikan, kerja sama <i>sister city</i> antara kota-kota di Indonesia dan Slovakia juga penting untuk dikembangkan.</p>	
5.	KSI - BKSAP	<i>5th IPU Task Force Meeting.</i>	Satgas Parlemen Dunia atau <i>IPU Task Force</i> untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina kembali menggelar pertemuan untuk kelima kalinya pada	19 Agustus 2022.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Jumat (19/08/2022). Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang juga merupakan Anggota <i>IPU Task Force</i> Fadli Zon turut hadir mengikuti pertemuan yang digelar secara virtual tersebut.</p> <p>Pada kesempatan itu, Ketua BKSAP memberikan apresiasi atas terlaksananya misi perdamaian ke dua negara tersebut. Fadli menilai kunjungan tersebut sangat produktif dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang konflik kedua negara.</p>	
6.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Ketua GKSB DPR RI- Parlemen Jepang dengan Duta Besar Jepang.	<p>Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Jepang, Puti Guntur Soekarno (F-PDIP) menerima Sekretaris I dan II Bidang Politik Kedutaan Jepang di Ruang Dubes, Gedung Nusantara III Lt. 2 (22/08/2022).</p> <p>Ketua GKSB menyambut baik kehadiran Sekretaris I & II Kedutaan Besar Jepang yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama antar parlemen Indonesia - Jepang. Hubungan diplomatik antara Indonesia - Jepang yang akan terjalin selama 65 tahun pada tahun 2023 menjadi modal yang kuat bagi kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, pendidikan dan pariwisata.</p> <p>Pertemuan menyoroti hubungan Indonesia - Jepang sebagai mitra strategis dalam</p>	22 Agustus 2022.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>menghadapi situasi global yang tidak menentu, dimana instabilitas karena dampak konflik juga menjadi tantangan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi bagi kedua negara. Disampaikan juga bahwa Jepang mendukung presidensi Indonesia di G20 dan DPR RI di P20, serta berharap dengan kepemimpinan Indonesia di forum tersebut dapat membantu mencapai resolusi konflik Ukraina - Rusia dan penguatan stabilitas di kawasan Asia Pasifik.</p> <p>Terkait kerja sama kawasan Indo - Pasifik, Indonesia merupakan inisiator ASEAN <i>Outlook on Indo-Pacific</i> yang menjadi visi kerja sama regional yang menekankan pada stabilitas dan keamanan regional.</p> <p>Dalam kesempatan ini Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Jepang juga mengundang Parlemen Jepang untuk hadir dalam perhelatan P20 yang akan diadakan pada tanggal 6-7 Oktober 2022 di Gedung Nusantara DPR RI. Ketua juga memberi arahan untuk mengadakan pertemuan dengan Dubes Jepang serta pertemuan bilateral dengan Delegasi Parlemen Jepang di sela-sela persidangan P20 tersebut.</p>	
7.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> GKSB DPR RI - Parlemen Oman dengan Duta Besar Oman.	Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Oman Prof. Dr. Zainuddin Maliki (F-PAN) menerima kunjungan kehormatan atau <i>courtesy call</i> dari KUIAI Duta Besar Oman untuk	22 Agustus 2022.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Indonesia Mr. Issa Ibrahim Alfarsi yang bertempat di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (22/8/2022). Pertemuan juga dihadiri oleh Ir. Endro Suswanto Yahman (F-PDIP) dan Drs. Al Muzzammil Yusuf (F-PKS).</p> <p>Pertemuan membahas sejumlah hal terkait upaya peningkatan hubungan kerja sama Indonesia-Oman. Berbagai upaya telah dilakukan guna meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara. Secara khusus, GKSB DPR juga mengapresiasi kehadiran Delegasi Majelis Shura Oman di Sidang <i>Umum Inter Parliamentary Union</i> ke-144 di Bali pada 20-24 Maret 2022. Hal tersebut membuktikan perhatian besar Parlemen Oman terkait urgensi diplomasi parlemen.</p> <p>Sebagai informasi, hubungan diplomatik antara Indonesia-Oman telah terjalin sejak tahun 1978. Hubungan bilateral kedua negara terus berkembang dan ditandai pendirian KBRI di Muscat pada Desember 2010. Saat ini, Pemerintah Oman telah memberikan kelonggaran visa bagi warga Indonesia yang ingin berkunjung ke Oman, selain itu penerbangan langsung dari Jakarta ke Muscat juga sudah tersedia.</p>	
8.	KSI - BKSAP	<i>Embassy Briefing</i> dengan Duta Besar Republik Indonesia	Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon (FP-Gerindra) menyampaikan beberapa substansi penting	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>negara G20 dan <i>Guest of the Host</i> terkait persiapan dan pelaksanaan <i>The Eighth G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)</i> tanggal 5-7 Oktober 2022.</p>	<p>kepada para duta besar negara terundang di forum P20, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Forum G20 dilaksanakan setiap tahun didahului oleh serangkaian pertemuan pada <i>Engagement Group (EG)</i> dan <i>Working Group (WG)</i>. Terdapat 11 <i>working groups</i>, <i>initiatif group</i>, and 10 <i>engagement groups</i> termasuk Parlemen (P20). b. Pertemuan P20 mencakup: sidang, pertemuan bilateral, <i>parliamentary forums</i>, dan <i>side-events</i> lainnya. c. Tujuan P20: <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan dan menyumbangkan perspektif parlementer. • Mendorong interaksi dan kerja sama antar parlemen dan pemerintah. • Memperkuat interkasi yang lebih kuat antara ketua-ketua Parlemen dengan mitra internasional lainnya. • Memperluas kontribusi parlemen dalam memperkuat pemulihan paska pandemi. d. Isu Prioritas: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Accelerating sustainable development and the green economy.</i> • <i>Emerging issues; food and energy security, and economy challenges.</i> 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Effective parliament and vibrant democracy.</i> • <i>Social inclusion, gender equality, and women empowerment.</i> <p>e. Delegasi Rusia akan hadir pada pertemuan P20.</p> <p>f. Delegasi India akan hadir pada pertemuan P20.</p> <p>g. Delegasi Ukraina diundang pada pertemuan P20.</p> <p>h. Jika Ketua Parlemen tidak bisa hadir, bisa diwakili oleh anggota parlemen lainnya.</p> <p>i. Mengharapkan kehadiran delegasi parlemen Amerika Serikat.</p> <p>Sebagai tambahan, Indra Iskandar, selaku Sekretaris Jenderal DPR RI juga menyampaikan hal teknis terkait persiapan P20, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. DPR RI bekerja sama dengan <i>Inter-Parliamentary Union (IPU)</i> telah mengirimkan undangan beserta dokumen pendukung lainnya kepada 20 negara G20, 16 negara non-G20, dan 10 organisasi internasional baik melalui email maupun langsung. b. Dokumen tersebut juga telah disampaikan kepada Kedutaan Besar negara undangan di Jakarta. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>c. Beberapa agenda <i>Social Function</i> akan diselenggarakan pada tanggal: 5, 6, dan 7 Oktober 2022. Detail acara akan disampaikan kembali.</p> <p>d. Pelaksanaan persidangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 - 3 Ketua Parlemen akan menyampaikan <i>keynote speech</i> pada setiap sesi, diikuti dengan intervensi yang disampaikan oleh delegasi lainnya. • Jumlah delegasi yang bisa masuk ke dalam ruang sidang berjumlah 4 orang (1 <i>Speaker</i> + 3 Pendamping). • Disediakan penerjemahan simultan jarak jauh dalam bahasa: Inggris, Perancis, Arab, dan Spanyol yang menggunakan “<i>Interprefy</i>” sebagai medianya. <p>e. <i>Official Hotel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hotel Fairmont • Hotel Mulia • Hotel Sultan <p>f. <i>Airport Handling dan Hospitality Delegasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan fasilitas penjemputan dan <i>VIP/lounge</i> di bandara. • Menyiapkan kendaraan melekat, petugas keamanan, dan <i>liaison officer</i> bagi Ketua Parlemen. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Delegasi lainnya akan mendapatkan penjemputan dari dan ke bandara, serta hotel dan <i>venue</i>. g. Protokol Covid <ul style="list-style-type: none"> • Bebas karantina bagi Warga Negara Asing yang telah menerima vaksin dosis kedua dan ketiga. • Tes swab PCR tetap diberlakukan bagi seluruh delegasi yang menghadiri <i>opening session</i> yang dibuka Presiden Republik Indonesia. 	
9.	KSR - BKSAP	<i>Briefing Session on the roles of the women parliamentarians</i> bersama WFD di Bogor.	<p><i>Briefing Session</i> bertajuk Peran Anggota Parlemen Perempuan dalam Memajukan Legislasi yang lebih Responsif terhadap isu Gender terkait Pemulihan dari Pandemi COVID-19 dan Upaya untuk Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan terlaksana dengan lancar dalam diskusi yang produktif (23/8/2022).</p> <p>Kegiatan Anggota BKSAP Perempuan ini bekerja sama dengan <i>Westminster Foundation for Democracy</i> dan <i>Canada Mission to ASEAN</i> dalam rangka persiapan Presidensi Indonesia di AIPA tahun 2023.</p> <p>Irine Yusiana Roba Puteri, S.Sos, MCOMN&MEDIAS (FPDIP) selaku Wakil Ketua WAIPA menyampaikan sambutannya bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling</p>	22 – 24 Agustus 2022.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>rentan terhadap dampak konflik dan pandemi COVID-19. Anggota parlemen perempuan bertanggung jawab tidak hanya dalam menyusun undang-undang yang lebih responsif terhadap isu gender, tetapi juga dalam mewujudkan perdamaian berkelanjutan dan pemulihan dari pandemi COVID-19.</p> <p>Sementara Ketua BKSAP DPR-RI, Dr. Fadli Zon, SS, MSi (F-PGerindra) dalam pidato pembuka diskusi menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi, parlemen merupakan institusi paling kapabel dalam legislasi yang lebih responsif terhadap isu gender. Anggota BKSAP perempuan berpartisipasi aktif dalam diplomasi parlemen terkait isu perempuan di forum -forum internasional dengan menekankan pentingnya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Agenda kelima; kesetaraan gender.</p> <p>Dimoderatori oleh Vanda Sarundajang (F-PDIP), <i>Briefing Session</i> ini mengundang Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen Luluk Nur Hamidah (F-PKB) dan Anggota parlemen dari Malaysia dan Thailand. Hadir pula Anggota BKSAP Perempuan lainnya Ina Ammania (FPDIP), Dra Adriana Charlotte Dondokambey, M.Si (FPDIP), Hj. Adde Rosi Khoerunissa, S.Sos, M.Si (F-PGolkar), Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos, M.Si (F-P.Gerindra),</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Katherine Anggela Oendoen (FP-Gerindra), Ratih Megasari Singkarru, M.Sc (F-PNasdem), Arzeti Bilbina, SE, MAP (FPKB), dan Linda Megawati, SE, M.Si (FPD) serta Puteri Anetta Komarudin (F-PGolkar) dan Pimpinan BKSAP yang menghadiri secara daring.	
10.	KSB - BKSAP	Pertemuan GKSB DPR-Parlemen Paraguay dengan Direktur Amerika II Kemlu RI.	<p>GKSB DPR RI - Parlemen Paraguay mengadakan Rapat Koordinasi dengan Direktur Amerika II Kemlu RI untuk membahas rencana program GKSB DPR RI - Parlemen Paraguay dan mendapatkan perkembangan isu terkini antara Indonesia - Paraguay (23/08/2022).</p> <p>Terkait hubungan bilateral antara Indonesia dan Paraguay, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah upaya peningkatan hubungan ekonomi dan volume perdagangan antara kedua negara serta peningkatan hubungan politik Indonesia - Paraguay, mengingat hubungan bilateral kedua negara telah terjalin selama 40 tahun.</p> <p>Guna meningkatkan volume perdagangan, Indonesia berupaya menginisiasi <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (CEPA) dengan Paraguay untuk memangkas tarif impor produk Indonesia di negara tersebut. Apabila perjanjian tersebut dapat direalisasikan, diharapkan hubungan ekonomi kedua negara dapat</p>	23 Agustus 2022.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>ditingkatkan. Disampaikan juga bahwa Kemlu RI telah menginisiasi INA - LAC dan INA - ACCESS yang bertujuan untuk mempromosikan produk - produk unggulan dari Indonesia dan menarik konsumen dari berbagai negara, termasuk Paraguay.</p> <p>GKSB DPR RI - Parlemen Paraguay juga berencana untuk melakukan kunjungan guna meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan dan kerja sama antar parlemen.</p> <p>Rapat dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Paraguay, Endang Maria Astuti (F-PG) dan dihadiri oleh anggota GKSB DPR RI - Parlemen Paraguay, Alimin Abdullah (F-PAN) serta Direktur Amerika II Kemlu RI, Darianto Harsono dan jajarannya.</p>	
11.	BKSAP	<i>Lunch Meeting</i> Pimpinan BKSAP dengan Delegasi Ketua Parlemen Timor-Leste.	<p>Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI menerima Ketua Parlemen Timor Leste beserta jajarannya di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Nusantara III Lt. 2 (23/08/2022).</p> <p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) mengapresiasi kehadiran Ketua Parlemen Timor Leste, Hon. Mr. Aniceto Guterres Lopes di Gedung DPR, dimana kehadiran Delegasi Parlemen Timor Leste juga menandai perayaan 20 tahun hubungan diplomatik Indonesia - Timor Leste yang telah terjalin sejak Juli 2002. Kedua negara</p>	23 Agustus 2022.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral yang meliputi bidang pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan infrastruktur.</p> <p>Disampaikan bahwa DPR RI selalu mendukung peranan Parlemen Timor Leste di kawasan Asia Tenggara dengan menjadi <i>observer</i> AIPA. Peranan tersebut kiranya dapat menjadi modalitas bagi Timor Leste untuk diterima sebagai anggota dari ASEAN.</p> <p>DPR RI dan Parlemen Timor Leste juga telah menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama kedua pihak dalam <i>capacity building</i>.</p>	
12.	KSR - BKSAP	<p><i>Briefing Session “The Roles of Women Parliamentarian in Advancing Gender Responsive-Legislation for Sustainable Peace and Covid-19 Recovery”</i> bersama <i>Westminster Foundation for Democracy dan Global Affairs Canada</i>.</p>	<p>Briefing Session bertajuk Peran Anggota Parlemen Perempuan dalam Memajukan Legislasi yang lebih Responsif terhadap isu Gender terkait Pemulihan dari Pandemi COVID-19 & Upaya untuk Mewujudkan Perdamaian yang Berkesinambungan, terlaksana dengan lancar dalam diskusi yang produktif (23/8/2022).</p> <p>Irine Yusiana Roba Puteri, S.Sos, MCOMN&MEDIAS (FPDIP), Wakil Ketua <i>Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)</i> menyampaikan, dalam konteks dampak konflik & pandemi COVID-19, perempuan masih merupakan kelompok paling rentan terhadap isu</p>	23 Agustus 2022.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tersebut. Anggota parlemen perempuan bertanggung jawab tidak hanya untuk memainkan peran penting dalam menyusun UU yang lebih responsif terhadap isu gender, tetapi juga dalam rangka meningkatkan peran dalam mewujudkan perdamaian berkelanjutan & pemulihan dari pandemi COVID-19.</p> <p>Ketua BKSAP DPR-RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) pada pidato pembuka diskusi menjelaskan, dalam sistem demokrasi, parlemen merupakan institusi paling kapabel ketika berbicara mengenai legislasi yang lebih responsif terhadap isu gender. Anggota BKSAP perempuan berpartisipasi aktif dalam diplomasi parlemen terkait isu perempuan di forum internasional dengan menekankan pentingnya mencapai SDGs, khususnya Agenda ke-5; kesetaraan gender.</p> <p>Dimoderatori Vanda Sarundajang (F-PDIP), Briefing Session ini mengundang Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen Luluk Nur Hamidah (F-PKB) & Anggota parlemen dari Malaysia & Thailand. Hadir pula Anggota BKSAP Perempuan lainnya Ina Ammania (FPDIP), Dra Adriana Charlotte Dondokambey, M.Si (FPDIP), Adde Rosi Khoerunissa, S.Sos, M.Si (F-PGolkar), Himmatul Aliyah, S.Sos, M.Si (F-P.Gerindra), Katherine Anggela Oendoen (FP-Gerindra), Ratih Megasari</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Singkaru, M.Sc (F-PNasdem), Arzeti Bilbina, SE, MAP (FPKB), dan Linda Megawati, SE, M.Si (FPD), Puteri Anetta Komarudin (F-PGolkar) & Pimpinan BKSAP yang menghadiri secara daring.	
13.	KSB - BKSAP	Resepsi Perayaan Hari Nasional Singapura.	Wakil Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) menghadiri acara resepsi perayaan Hari Nasional Singapura.	23 Agustus 2022.
14.	BKSAP	Ketua dan Anggota BKSAP menghadiri Jamuan Makan Malam Ketua DPR RI dengan Delegasi Parlemen Timor Leste.	Jajaran Pimpinan dan Anggota BKSAP menghadiri Jamuan Makan Malam Ketua DPR RI dengan Delegasi Parlemen Timor Leste di Plataran. Jajaran Pimpinan dan Anggota BKSAP yang hadir: 1. Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) 2. Gilang Dhielafararez (F-PDIP) 3. Putu Supadma Rudana (F-PD) 4. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) 5. Adriana Charlotte (F-PDIP) 6. Ina Ammania (F-PDIP) 7. Andi Achmad Dara (F-PG) 8. Syahrul Aidi Maazat (F-PKS) 9. Ema Umiyyatul Chusnah (F-PPP)	23 Agustus 2022.
15.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> GKSB DPR RI – Parlemen Kuwait dengan KUI Kedutaan Besar Kuwait.	Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Kuwait, Dian Istiqomah (F-PAN) menerima KUI Kedutaan Besar Kuwait, Mr. Abdullah Yatim Al Fadhli dan Diplomat Kuwait, Mr. Abdurrahman Al Shami di Gedung Nusantara III lt. 2 DPR RI (29/08/22).	29 Agustus 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Dalam Pertemuan pihak GKSB DPR RI - Parlemen Kuwait dengan Kedutaan Besar Kuwait di Jakarta, disampaikan bahwa Pihak Kuwait sangat mengapresiasi hubungan diplomatik Indonesia - Kuwait yang secara umum sangat positif. Dalam bidang perdagangan, hubungan kedua negara juga sangat baik meskipun neraca perdagangan perlu terus ditingkatkan. Sementara itu di bidang investasi, melalui <i>Kuwait Investment Authority</i> (KIA), negara tersebut telah banyak melakukan investasi di Indonesia. Sebaliknya, Indonesia juga aktif berinvestasi di Kuwait, khususnya di bidang kelistrikan. KUIAI mengharapkan Indonesia dapat terus aktif berinvestasi di berbagai proyek-proyek besar di Kuwait.</p> <p>Selain di bidang perdagangan dan investasi, kedua negara juga menjalin kerja sama di berbagai bidang seperti, <i>charity</i>, pemuda dan olahraga, pertanian serta peternakan. Berbagai bidang kerja sama Indonesia - Kuwait juga diformalkan dengan nota kesepahaman antara kedua negara dan didukung dalam Forum Konsultasi Bilateral Indonesia - Kuwait.</p> <p>Disampaikan juga bahwa Kuwait mendukung presidensi Indonesia di G20 serta berharap penyelenggaraan P20 di DPR RI dapat sukses terlaksana.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
16.	KSR - BKSAP	<i>Coordinating Committee of Women Parliaments of AIPA (WAIPA) di Tangerang Selatan.</i>	<p>Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP) bersama anggota BKSAP Agustina Wilujeng Pramestuti (F-PDIP), Dyah Roro Esti Widya Puteri (F-PG) & Ratih Megasari Singkarru (F-Nasdem) menghadiri <i>Virtual Meeting of Coordinating Committee of WAIPA (30/8/2022)</i>.</p> <p>Forum ini membahas 2 tema tentang: 1) Peran Parlemen Mempromosikan Pemulihan Pandemi COVID-19 yang Responsif terhadap isu Gender; dan 2) Peran Parlemen dalam Memajukan Agenda Perempuan, Perdamaian & Keamanan.</p> <p>Dyah Roro menyampaikan, Anggota Parlemen perempuan memiliki peran menentukan dalam penyusunan kebijakan pemulihan pandemi COVID-19 yang lebih responsif terhadap isu gender melalui fungsi legislasi, pengawasan & anggaran serta menjelaskan kebijakan pemulihan pandemi di Indonesia yang memperhatikan perempuan sebagai yang paling terdampak secara sosial ekonomi. Program Kartu Pra-kerja & Program Keluarga Harapan menasar 49% perempuan sebagai penerima manfaat dari kedua program.</p> <p>Ketua Delegasi Irine Yusiana yang juga <i>Vice Chair of WAIPA</i> menegaskan pentingnya mengintegrasikan isu kesehatan mental dengan kebijakan kesehatan atau pemulihan sosial ekonomi paska pandemi karena isu kesehatan mental adalah salah satu dampak sosial dari pandemi COVID-19 yang cukup</p>	29 – 31 Agustus 2022.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>signifikan. Respon pemerintah harus didasarkan pada prinsip <i>affordability & accessibility</i>, terutama bagi perempuan, anak & kalangan miskin.</p> <p>Agustina Wilujeng menyampaikan, Indonesia sangat berkomitmen menghormati, melindungi dan memenuhi HAM termasuk peran perempuan dalam agenda & keamanan, baik di tingkat Internasional, regional & nasional. Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara terbesar ke-7 untuk pengiriman pasukan perdamaian perempuan. Indonesia juga inisiator dari <i>South East Asian Network of Women Peace Negotiators & Mediators</i>. Di dalam negeri, DPR telah mengesahkan UU Tindak Kekerasan terhadap Perempuan yang sempat tertunda selama 6 tahun.</p> <p>Ratih Megasari Singkarru menyorot tentang kekerasan berbasis gender yang masih banyak dialami perempuan terutama di daerah konflik. Politisi Nasdem tersebut menyampaikan harapannya agar WAIPA dpt lebih berperan & berkontribusi dalam melindungi perempuan di daerah konflik, terutama di kawasan ASEAN, dari kekerasan.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

NO	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Penyelidikan dan Verifikasi	<p>- Permintaan keterangan dan klarifikasi terkait pernyataan Menkopolhukam di media online denpasar.com tanggal 13 Agustus yang berjudul “Sambo rancang skenario dengan menghubungi Anggota Kopolnas dan Anggota DPR RI” mengundang Prof. Dr. Mahfud MD</p> <p>- Permintaan keterangan dan klarifikasi pernyataan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) di media online suara.com tanggal 14 Agustus yang berjudul “Ungkap Operasi Sebar Dana Ferdy Sambo Muluskan Skenario Kematian Brigadir J, IPW; Ada Informasi DPR juga dapat”</p>	
2.	Audiensi DPRD	Tanggal 29 Agustus 2022 DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Audiensi dan Konsultasi terkait Kode Etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD	
3.	Kunjungan Kerja	Sosialisasi Tugas, Fungsi, wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus Anggota DPR RI di Provinsi Jawa Barat	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	<p>Rapat Intern, Kamis, 18 Agustus 2022 Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Pergantian Wakil Ketua BURT 2. Penetapan Jadwal Kegiatan BURT MS I TS 2022-2023 	<p>Pergantian Wakil Ketua BURT dari Fraksi PAN semula H.A. Bakri HM., SE. digantikan oleh H. Nasril Bahar SE.</p>	
2.	<p>Kunjungan Kerja Dalam Negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yogyakarta, 22-24 Agustus 2022. 2. Surabaya, Jawa Timur, 25-28 Agustus 2022 3. Semarang, Jawa Tengah, 29-31 Agustus 2022 	<p>Peninjauan rumah sakit provider PT. Asuransi Jasindo dan ke kantor perwakilan PT. Asuransi Jasindo di daerah dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hasil peninjauan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi BURT terhadap pelayanan program Jamkestama.</p> <p>Kunjungan Kerja Dalam Negeri BURT DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan di stasiun Kereta Yogyakarta untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelaksanaan keprotokolan sesuai ketentuan peraturan. 2. Meninjau ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana di stasiun agar pelaksanaan keprotokolan berjalan lancar. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan terkait Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021. 2. Hasil rapat adalah pembentukan dua Panja: <ul style="list-style-type: none"> a. Panja Perumus Kesimpulan dalam rangka Pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021; b. Panja Draft RUU dalam rangka Pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021. 	Raker dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Agustus 2022, Pkl. 13.00 WIB di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.
2.	Menteri Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rapat Panja Perumus Kesimpulan dalam rangka Pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021; 2. Rapat Panja Draft RUU dalam rangka Pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021; 3. Rekomendasi Rapat Panja; <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan pemantauan secara berkala atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021. b. Menyelesaikan permasalahan pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan 	Raker dilaksanakan pada hari Senin, 29 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB dan 14.00 WIB di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui perbaikan tata kelola maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian/Lembaga, dan melakukan pendampingan khususnya kepada Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya belum mendapat opini audit “Wajar Tanpa Pengecualian”.</p> <p>c. Menyempurnakan regulasi yang diperlukan untuk standardisasi keluaran (<i>output</i>) dan hasil (<i>outcome</i>) dari belanja negara serta memperjelas kriteria terkait <i>output/outcome</i> dalam proses perencanaan, penganggaran dan peningkatan kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, guna mewujudkan kinerja anggaran yang lebih tepat guna dan tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan kemudahan akses atas pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan dan bantuan dari pemerintah.</p> <p>d. Menyempurnakan sistem informasi dan basis satu data Indonesia yang menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam menganggarkan dan merealisasikan pengeluaran negara, khususnya atas investasi pemerintah, belanja bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi baik energi maupun</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>non energi agar lebih tepat sasaran dan efektif mencapai tujuan investasi/belanja, serta untuk lebih memberikan rasa keadilan kepada sebagian besar masyarakat. Adapun terhadap kompensasi, Pemerintah secara bertahap mengurangi kompensasi listrik dan BBM.</p> <p>e. Meningkatkan akurasi dan koordinasi dalam memantau realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga dapat tercipta efisiensi pendanaan anggaran yang ditunjukkan antara lain dengan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Saldo Anggaran Lebih yang lebih efisien untuk mendukung konsolidasi fiskal.</p> <p>f. Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara dan badan/lembaga lainnya dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan secara transparan dan akuntabel guna memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial, sehingga meningkatkan daya saing Indonesia dan menjaga agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara.</p> <p>g. Penerapan TKDN dalam setiap pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus lebih optimal sebagaimana diatur pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021.</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> h. Pemerintah perlu segera memperbaiki kualitas dan proses penyaluran TKD, hal ini agar dana yang disalurkan lebih cepat diserap oleh daerah dan tidak ada kendala administrasi penggunaannya. i. Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dalam upaya meningkatkan pendapatan negara berupa PNBPN pada Kementerian/Lembaga. j. Pemerintah hendaknya harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh catatan yang disampaikan oleh BPK, agar terjadi perbaikan kualitas hasil <i>review</i>. 	
3.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menteri Keuangan 2. Menteri PPN/Kepala Bappenas dan 3. Gubernur BI. 4. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia terkait pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2023. 2. Hasil rapat adalah pembentukan Panja: <ul style="list-style-type: none"> a. Panja Asumsi Ekonomi Makro, Pendapatan dan Defisit b. Panja Belanja Pemerintah Pusat c. Panja Belanja Transfer ke Daerah d. Panja Draf RUU APBN 2023 	Raker dilaksanakan pada Selasa, 30 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua KADIN, Ketua HIPMI, Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Direktur Utama PT. Sucofindo.	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dengan Ketua KADIN, Ketua HIPMI, Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Direktur Utama PT. Sucofindo dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Kepabeanaan dan Cukai.	RDP dilaksanakan pada hari Senin, 22 Agustus 2022.
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah Kota Batam • Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam • Kepala Kantor Perwakilan Bea dan Cukai Provinsi Kepri. 	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, <i>selanjutnya melakukan pertemuan dengan Wakil Walikota Batam</i> , Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Kepala Kantor Perwakilan Bea dan Cukai Provinsi Kepri dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Kepabeanaan dan Cukai.	Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Kepala Kantor Perwakilan Bea dan Cukai Jawa Timur I.	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Provinsi Jawa Timur, <i>selanjutnya melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Perwakilan Bea dan Cukai Jawa Timur I dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Kepabeanaan dan Cukai.</i>	Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus s.d. 1 September 2022
